



DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP BAHAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Muhammad Zais M, Samiun dan Nurdin I Muhammad

Fakultas EKonomi - Universitas Khairun

Email : mzaissamiun@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to: (1), Knowing the share of expenditure, the progress of prices of staple food and people's income in Central Halmahera Regency, (2), Analyzing the level of people's purchasing power with an indicator of the ratio of income to prices of staple foods in Central Halmahera Regency, and (3), Analyze the level of people's purchasing power with an indicator of the ratio of income to the index of staple food prices in Central Halmahera Regency. The results of the analysis show that the expenditure of community households in Central Halmahera Regency is specifically allocated to fulfill the consumption of fresh rice and fish, followed by consumption of flour, sugar and cooking oil. While the allocation of expenditures for consumption of staple-sourced staple foods includes chicken, milk, eggs and beef is still very low. The price of staple food in Central Halmahera Regency during the observation period of 2009 until 2018 in January - March, tends to increase in the range of 2% - 12%. Whereas on the other hand, the level of income of the community only changes in the range of 5% - 7%, with the highest income enjoyed by employees and entrepreneurs and conversely the lowest income is felt by farmers. The purchasing power of people in Central Halmahera Regency with an indicator of the ratio of income to each of the staple food prices tends to fluctuate but has experienced significant improvements in 2018 compared to 2009, except for the purchasing power measured as equal to beef consumption. The purchasing power equivalent to beef consumption has decreased to 22.32% because the percentage increase in income is less able to compensate for the increase in beef prices. Measured by the income ratio indicator on the basic food price index, people's purchasing power also showed an improvement in 2018 compared to 2009, but that only happened to farmers, construction workers, and civil servants groups I / II. When compared to 2017, public purchasing power in 2018 as a whole decreased by 12.38%. The purchasing power level of people in Central Halmahera Regency from the lowest ranking in sequence is felt by groups of farmers, followed by construction workers, civil servants groups I / II, entrepreneurs and employees.*

Key Words : Staple Food, People's Purchasing Power, Prices, Income.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan pada prinsipnya adalah untuk

mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Diantara berbagai pilihan, taraf kesejahteraan

masyarakat dalam pembangunan yang terpenting adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent living*). Standar hidup layak atau lebih dikenal dengan daya beli adalah komponen dari indeks pembangunan manusia yang cukup sulit untuk di tingkatkan (Jum'at, 2008). Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kaitannya dengan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok, terdapat berbagai variabel ekonomi yang sangat mempengaruhi diantaranya adalah tingkat harga pangan, tingkat pendapatan serta alokasi pengeluaran terhadap bahan pangan. Harga pangan merupakan salah satu aspek dalam ekonomi pangan yang selalu dimonitor oleh pemerintah secara berkala karena bila terjadi kenaikan harga yang tajam berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Menurut Rachman (2005), ada lima tujuan yang ingin dicapai pemerintah terkait dengan kebijakan harga pangan, yaitu 1) meningkatkan

pendapatan petani, 2) meningkatkan insentif kepada petani kecil agar tetap memproduksi bahan pangan, 3) mengurangi ketergantungan akan impor dan mencapai swasembada pangan, 4) menjaga kestabilan harga dan 5) menaruh perhatian pada daya beli masyarakat sehingga kebutuhan pangan terjamin. Terkait daya beli, kenaikan harga pangan akan berdampak lebih besar terhadap kelompok masyarakat berpendapatan tetap yang rendah (miskin) sehingga akan berisiko tinggi terhadap nutrisi dan kerawanan pangan (*food insecurity*). Lebih lanjut, menurut Firdaus (2017), kebanyakan negara di dunia menghadapi persoalan pangan hanya karena variasi musiman. Ada periode waktu tertentu dimana produksi berkurang. Sedangkan untuk kasus Indonesia, selain variasi musiman, variasi geografis karena sebagai negara kepulauan juga turut mempengaruhi persoalan pangan. Pada beberapa komoditas, meskipun produksi kadang cukup namun persoalan distribusi juga menyebabkan di beberapa daerah mengalami kelangkaan yang kemudian sangat

berimplikasi terhadap tingkat harga pangan di pasar domestik.

Selain harga, pendapatan menjadi ukuran utama untuk melihat sejauhmana daya beli masyarakat meningkat atau tidak, Pendapatan digunakan pula untuk mengukur sejauhmana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan terhadap bahan pangan seperti membeli beras, daging, ikan, dan lainnya. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan besaran harga barang dan jasa khususnya harga pangan dalam perekonomian daerah tentunya sangat berimplikasi terhadap alokasi pengeluaran perkapita. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2007), menjelaskan bahwa pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kabupaten Halmahera Tengah lebih banyak teralokasikan untuk kelompok makanan yakni Rp. 449.756.- atau 54,76, sedangkan untuk kelompok bukan makanan rata-rata sebesar Rp. 371.560.- atau 45,24 %. Alokasi atau pangsa pengeluaran rumah tangga per kapita mencerminkan kualitas standar hidup layak di suatu daerah yang ditunjukkan oleh tercapainya

kebutuhan dasar manusia. Rumah tangga yang memiliki pangsa pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk bukan makanan.

Kondisi lain yang juga mempengaruhi indeks daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok, bahwa dengan karakteristik geografis wilayah kepulauan berimplikasi terhadap pola distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok yang akhirnya sangat berdampak terhadap tingkat harga pangan pokok di pasar domestik. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar bahan pangan pokok yang menjadi makanan utama masyarakat masih sangat bergantung pada pangan impor dari luar wilayah. Artinya bahwa dengan kapasitas produksi bahan pangan lokal yang masih terbatas maka ketika terjadi kenaikan harga bahan pangan impor dan biaya transportasi akan sangat berdampak

terhadap naiknya harga bahan pangan dalam pasar domestik yang kemudian berimplikasi terhadap indeks daya beli masyarakat, terutama ketika peningkatan harga tersebut jauh lebih besar dari perubahan pendapatan masyarakat.

Mengingat hal tersebut, analisis mengenai dampak dinamika harga bahan pangan pokok terhadap daya beli perlu dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan daya beli dengan membandingkan dinamika pendapatan dan harga bahan pangan pokok, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan tetap. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperkirakan tingkat daya beli sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat daya beli yang dimaksud adalah tingkat daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau upah dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa dan tingkat pendapatan. Dari hasil kajian ini diharapkan akan terlihat gambaran bagaimana perubahan daya beli seiring dengan perubahan harga bahan pangan pokok tersebut. Adapun

penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui pangsa pengeluaran, perkembangan harga bahan pangan pokok dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah, (2). Menganalisis tingkat daya beli masyarakat dengan indikator rasio pendapatan terhadap harga pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah, dan (3). Menganalisis tingkat daya beli masyarakat dengan indikator rasio pendapatan terhadap indeks harga pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah.

TINJAUAN KONSEPTUAL Pengertian dan Pengelompokan Pangan Pokok

Kebutuhan paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa adalah pangan. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, diperlukan dalam mencapai ketahanan pangan. Faktor lain yang merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan adalah tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau dari sisi harga dan aman dikonsumsi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi dalam aktivitas sehari-hari (Saliem et al, 2002). Pangan dinilai penting

(Nurkhayani, 2009) karena kenaikan harga pangan dapat menyebabkan penurunan konsumsi kalori dan protein yang besar.

Dalam UU Pangan yang baru yaitu UU No, 18 Tahun 2012 (Setneg, 2012) tentang Pangan, pengertian pangan lebih diperluas terutama ruang lingkup jenis pangannya. Dalam UU Pangan tersebut, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pada UU UU No, 18 Tahun 2012, pangan pokok didefinisikan secara eksplisit, Pangan Pokok berdasarkan UU ini adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. FAO (2010) mendefinisikan pangan pokok sebagai pangan yang dikonsumsi

secara rutin pada kuantitas tertentu yang menjadi bagian dominan dalam pola makan dan merupakan sumber asupan energi dan gizi utama yang dibutuhkan. Pangan pokok memang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi karena tubuh membutuhkan variasi pangan lain (Ariani, 2010).

Penentuan jenis pangan yang dikonsumsi sangat tergantung kepada beberapa faktor, di antaranya jenis tanaman penghasil bahan pangan pokok yang biasa ditanam di daerah serta tradisi yang diwariskan oleh budaya setempat. Perilaku konsumsi pangan masyarakat dilandasi oleh kebiasaan makan (*food habit*) yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga melalui proses sosialisasi (Hidayah, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2011), bahan pangan dibagi ke dalam sembilan kelompok yang meliputi (1) padi-padian (beras, jagung, terigu), (2) umbi-umbian (singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lainnya), (3) pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan), (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak sawit, minyak lainnya), (5)

buah/biji berminyak (kelapa, kemiri), (6) kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang lain), (7) gula (gula pasir, gula merah, (8) sayuran dan buah (sayur, buah), (9) lain-lain (minuman, bumbu-bumbuan). Selanjutnya menurut Surat Keputusan Menko Perekonomian No, Kep-28/M,EKON/05/2010 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok, Bapok meliputi beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

Konsep Harga Pangan

Menurut Hanafie (2010), harga merupakan cerminan dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga (sebagai sektor konsumsi) dan sektor industri (sebagai sektor produksi). Sebagai cerminan kekuatan-kekuatan pasar, pemerintah tidak selalu dapat mengendalikan mekanisme pembentukan harga kepada kekuatan pasar atas suatu komoditi tertentu, Kebijakan harga didefinisikan sebagai campur tangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mengubah harga-harga yang diterima dan dibayakan oleh para pelaku pasar (produsen dan konsumen).

Kaitannya dengan pangan, kebijakan harga pangan bertujuan untuk mencapai salah satu atau kombinasi dari tujuan-tujuan yaitu (Hanafie, 2010): 1). Kontribusi terhadap anggaran pemerintah, 2). Pertumbuhan devisa negara, 3). Mengurangi ketidakstabilan harga, 4). Memperbaiki distribusi pemasaran dan akses sumber daya, 5). Memberikan arah produksi, serta meningkatkan taraf swasembada dan serat-seratan, dan 6). Meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk,

Keadaan produsen dikatakan lebih baik apabila surplus produsen lebih tinggi dan sebaliknya keadaan konsumen dikatakan lebih baik bila surplus konsumen mengalami kenaikan. Beberapa analisis terhadap kebijakan harga didasarkan atas surplus produsen dan konsumen (Hanafie, 2010) diantaranya: 1). Harga rendah untuk produsen dan konsumen: produsen bebas mengambil keputusan, 2). Harga rendah untuk produsen dan konsumen: tingkat produksi dipaksakan pada produsen,

- 3). Harga rendah untuk konsumen: harga produsen yang tidak terdistorsi,
- 4). Harga rendah konsumen: harga produsen yang dilindungi,
- 5). Harga tinggi untuk konsumen dan produsen: keadaan impor, dan
- 6). Harga tinggi untuk konsumen dan produsen: keadaan ekspor.

Teori Pendapatan

Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain :

1. Pendapatan pribadi, yaitu: semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
2. Pendapatan disposable, yaitu: pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposable.
3. Pendapatan nasional, yaitu: nilai seluruh barang-barang jadi dan

jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Menurut Sobri (1999) pendapatan disposable adalah suatu jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap dibelanjakan atau dikonsumsi. Menurut Teori Milton Friedman bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pendapatan permanen dapat diartikan pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai contoh adalah upah dan gaji.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat

Daya beli diartikan sebagai kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan. Daya beli merupakan kemampuan seseorang, keluarga atau masyarakat untuk memperoleh suatu barang/jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat yaitu (Sukardi, 2009):

1. **Tingkat Pendapatan.** Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji, Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya.
2. **Tingkat Pendidikan.** Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan computer dibandingkan seseorang lulusan sekolah dasar.
3. **Tingkat Kebutuhan.** Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa.
4. **Kebiasaan Masyarakat.** Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme didalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup.
5. **Harga Barang.** Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan.
6. **Mode.** Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi konsumsi.

Harga merupakan indikator penting dalam ekonomi, terutama jika menyangkut bahan pangan. Penelitian mengenai hubungan antara harga pangan dengan daya beli masyarakat sudah banyak dilakukan, Ivanic dan Martin (2008) melakukan studi yang difokuskan pada pengaruh kenaikan harga bapak di negara-negara miskin terhadap tingkat kemiskinan. Di satu sisi, peningkatan harga akan meningkatkan pendapatan bagi mereka yang menjual produk tersebut, Sedangkan di sisi lain, konsumen akan dirugikan. Efek kenaikan harga tersebut terhadap kemiskinan

bergantung pada keseimbangan antara dua sisi tersebut. Namun demikian, hasil studi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek kenaikan harga pangan meningkatkan kemiskinan secara substansial.

Instabilitas dan kenaikan harga pangan merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Frankenberg, Thomas dan Beegle (1999) melakukan studinya saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Tahun 1998 merupakan titik puncak krisis ekonomi dimana perekonomian menyusut 15% dan inflasi meroket sebesar 80%. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga untuk berbagai barang dan jasa. Hasil studi menunjukkan bahwa rumah tangga di perkotaan mengalami penurunan konsumsi 10-15% lebih besar dibandingkan rumah tangga di pedesaan. Pengaruh instabilitas harga terhadap daya beli juga menjadi latar belakang studi yang dilakukan Galtier (2009). Instabilitas harga yang tinggi di negara berkembang akan berakibat pada ketahanan pangan, bukan hanya dalam jangka pendek (akses terhadap pangan) tetapi juga dalam jangka

panjang (insentif bagi produsen dalam memproduksi dan berinvestasi). Dari hasil-hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bagaimana kenaikan harga pangan mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum terutama untuk yang pendapatannya rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Hertel, Ivanic, Preckel, dan Crandfield (2004) dalam Ivanic dan Martin (2008), alasan utama mengapa tingginya harga pangan berpengaruh besar terhadap masyarakat miskin adalah fakta bahwa kaum miskin membelanjakan sekitar 75% dari pendapatannya untuk membeli bahan pangan pokok.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Kajian tentang daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok dilaksanakan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Waktu pelaksanaan kajian, yakni dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018, dengan periode analisis tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2018.

Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan cara terbuka dan melakukan tiga tahap kegiatan sebagai berikut. *Pertama*, proses memasuki lapangan (*getting in*). *Kedua*, ketika berada di lapangan (*getting along*). Dan *ketiga*, mengumpulkan data (*logging the data*). Kajian ini menggunakan dua sumber data, Data primer diperoleh dengan beberapa cara, seperti penggunaan wawancara mendalam (*in-depth interview*, melalui *key persons*) dan investigasi serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kelompok masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan melakukan studi dokumen yang berasal dari departemen pemerintah, lembaga riset, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan lain-lain. Dari kedua sumber data tersebut diharapkan diperoleh data yang lebih lengkap.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder *time series* dengan periode tahun 2009 s.d, Maret 2018 yang diperoleh dari hasil wawancara

dan publikasi BPS. Data yang diperlukan meliputi :

1. Harga bulanan dan tahunan sembilan komoditi pangan yang memiliki pangsa pengeluaran terbesar dalam konsumsi rumah tangga (berdasarkan SUSENAS) yang terdiri dari: beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, ikan segar, daging ayam, daging sapi, susu kental manis dan telur.
2. Volume / Jumlah komoditi pangan yang dikonsumsi.
3. Pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, yang di-proxy oleh upah bulanan Tani, upah bulanan Buruh Bangunan, upah bulanan Karyawan, gaji pokok per bulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II, dan pendapatan bulanan Wirausaha.
4. Pangsa pengeluaran untuk konsumsi bahan pangan pokok yang diperoleh dari hasil survei Susenas BPS.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara

mendetail tentang perkembangan harga bahan pangan pokok yang dianalisa maupun gambaran tentang perkembangan pendapatan dari masing-masing upah upah bulanan Tani, upah bulanan Buruh Bangunan, upah bulanan Karyawan, gaji pokok per bulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II, dan pendapatan bulanan Wirausaha di Kabupaten Halmahera Tengah. Analisis ini menggunakan pendekatan tabulasi dan grafik.

Analisis Rasio Pendapatan terhadap Harga Pangan

Rasio pendapatan terhadap harga pangan (RPH) merupakan salah satu metode untuk mengukur daya beli masyarakat secara umum. Metode ini

Analisis Rasio Pendapatan Terhadap Indeks Harga Bahan pangan pokok

Rasio pendapatan terhadap indeks harga bahan pokok digunakan untuk mengukur tingkat daya beli Dimana IB = Indeks Bahan pangan

W = bobot tiap

Menghitung rasio pendapatan terhadap indeks bahan pangan pokok

dapat membantu mengukur tingkat daya beli masyarakat relatif terhadap harga komoditi tertentu (dalam hal ini 9 bahan pokok) seiring dengan perubahan tingkat pendapatan sebagai berikut (Resnia, 2012):

$$RPH_t = \frac{I_{jt}}{P_{it}}$$

Dimana : RPH = Rasio pendapatan terhadap harga komoditi

P = Harga komoditi

I = Pendapatan

i = Jenis komoditi bahan pangan pokok

j = Upah Tani, Buruh Bangunan, Karyawan, gaji PNS, dan penghasilan Wirausaha

t = Periode waktu (tahun)

masyarakat relatif terhadap perubahan harga 9 bahan pokok (Resnia, 2012):

$$IB_t = \frac{\sum P_{it} \cdot W_{it}}{\sum P_{io} \cdot W_{io}} \quad \text{dan}$$

$$W_{it} = \frac{\text{Pangsa Pengeluaran}_i}{\sum \text{Pangsa Pengeluaran}}$$

t = periode tertentu

o = periode tahun dasar

sehingga dihasilkan Indeks Daya Beli (IK) dimana masing-masing

pendapatan dibagi dengan IBt sehingga dihasilkan ukuran atau tingkat daya beli terhadap bahan pangan pokok. IK dapat dihitung dengan formula berikut :

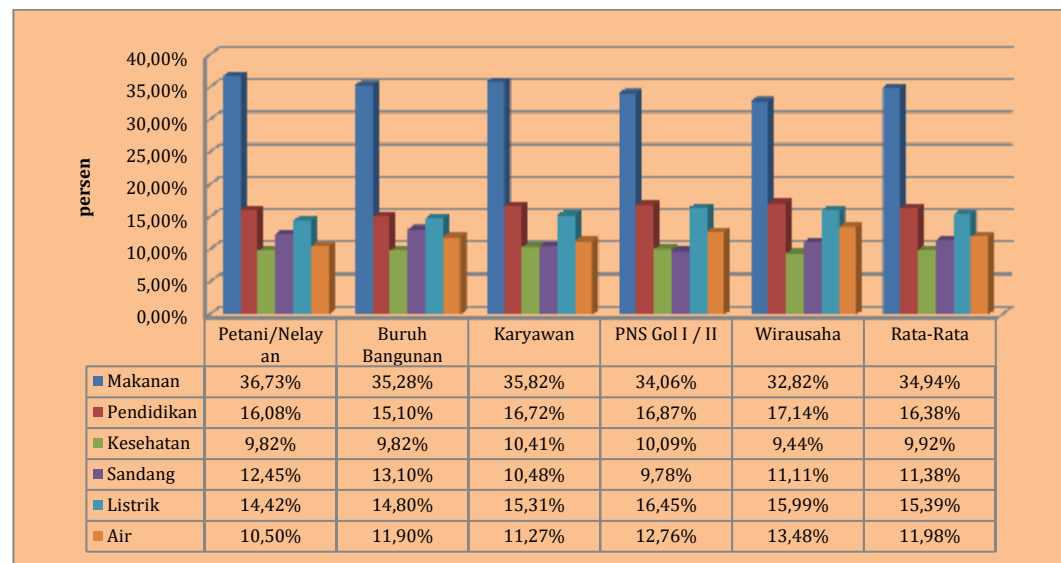
$$IK_t = \frac{I_{jt}}{IB_t}$$

Dimana IK = Indeks Daya Beli
(Daya beli)

Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga, Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok Dan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Tengah

Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga Terhadap Bahan Pangan Pokok

Salah satu variabel ekonomi yang bisa dijadikan sebagai indikator terpenuhinya kebutuhan dasar adalah adanya peningkatan pangsa pengeluaran setiap rumah tangga masyarakat atas bahan makanan maupun bukan bahan makanan. Sesuai hasil analisis yang dilakukan terhadap kelompok responden (lihat Gambar 1), dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, teridentifikasi bahwa pangsa pengeluaran rata-rata per bulan untuk makanan mencapai 34,94 %.



Sumber : Hasil Analisis, 2018.

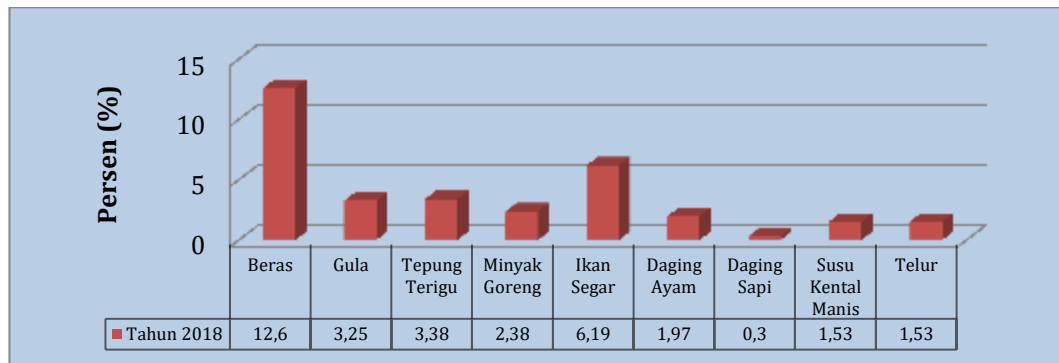
Gambar 1. Alokasi Pengeluaran Rata-Rata Per Bulan Menurut Kelompok Barang dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah

Secara spesifik dalam konsumsi bahan makanan khususnya konsumsi bahan pangan pokok berupa beras, gula, tepung terigu,

minyak goreng, ikan, daging ayam, daging sapi, susu kental manis dan telur, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pangsa pengeluaran

pada setiap bahan pangan pokok. Proporsi pengeluaran rumah tangga masyarakat terhadap bahan pangan pokok teralokasi untuk memenuhi kebutuhan beras mencapai 12,6 % dan diikuti oleh pangan ikan segar

sebesar 6,19 %. Sedangkan konsumsi daging sapi sebagai sumber protein hewani hanya mendapatkan proporsi 0,3 %. Secara terinci disajikan dalam Gambar 2 berikut.



Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2018. Data Diolah.

Gambar 2. Pengeluaran Rumah Tangga Terhadap Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Halmahera Tengah

Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok

Perbedaan dan fluktuasi harga bahan pangan pokok pada setiap wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah biaya produksi dan karakteristik bahan pangan, tingkat persediaan, maupun pola dan rantai distribusinya. Kondisi faktual perkembangan harga bahan pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang periode tahun 2009 hingga bulan Maret tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut. Dari ke-9 (sembilan) bahan pangan pokok yang dikonsumsi selama 9 (sembilan) tahun terakhir,

harga tertinggi terjadi pada pangan daging sapi dan diikuti oleh daging ayam, ikan segar, minyak goreng, gula pasir, beras, susu kental manis, tepung terigu dan telur. Dalam perkembangannya, harga bahan pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung mengalami peningkatan. Harga tertinggi terjadi pada daging sapi dengan kenaikan 140 % atau bergerak dari harga Rp. 50.000.-/kg di tahun 2009 menjadi Rp. 120.000.-/kg di per bulan Maret Tahun 2018, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 12,34 %. Kenaikan harga juga terjadi pada bahan pangan

pokok lainnya, kecuali pada minyak dibandingkan dengan tahun 2009, goreng yang mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata per harga -4,20 % di tahun 2018 tahun adalah 0,69 %.

Tabel 1. Perkembangan Harga Rata-rata Per Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2009 s.d. 2018.

Tahun	Beras (Rp/Kg)	Gula Pasir (Rp/Kg)	Tepung Terigu (Rp/Kg)	Minyak Goreng (Rp/Kg)
2009	8,000	10,000	7,500	15,292
2010	9,417	10,250	6,000	15,583
2011	11,000	12,000	8,600	10,750
2012	10,083	13,583	8,750	13,250
2013	10,417	12,813	8,900	13,300
2014	11,833	13,083	9,000	13,333
2015	13,700	13,700	9,000	13,000
2016	12,950	15,575	9,000	15,375
2017	13,000	15,000	9,000	16,000
Jan-Mar 2018	13,800	15,000	10,300	14,650
Harga Rata-Rata	11,420	13,100	8,605	14,053
Pertumbuhan 9 Tahun	72.50%	50.00%	37.34%	-4.20%
Pertumbuhan Rata- Rata	6.66%	4.88%	4.71%	0.69%

Tahun	Ikan Segar (Rp/Kg)	Daging Ayam (Rp/Kg)	Daging Sapi (Rp/Kg)	Kental manis (Rp/ Kaleng)	Telur (Rp/ Butir)
2009	25,208	35,000	50,000	9,000	1,500
2010	14,583	35,000	50,000	9,000	1,500
2011	15,000	42,900	89,200	9,000	1,500
2012	16,250	43,000	90,000	10,000	1,750
2013	22,800	45,000	95,000	10,000	1,600
2014	23,000	45,000	99,000	10,000	2,000
2015	25,500	47,500	110,000	11,000	2,000
2016	37,650	41,650	100,800	10,000	2,500
2017	30,000	50,000	100,000	12,000	2,500
Jan-Mar 2018	46,650	60,000	120,000	12,000	1,650
Harga Rata-Rata	25,664	44,505	90,400	10,200	1,850
Pertumbuhan 9 Tahun	85.06%	71.43%	140.00%	33.33%	10.00%
Pertumbuhan Rata- Rata	11.55%	6.75%	12.34%	3.56%	2.68%

Sumber : Hasil Analisis, 2018.

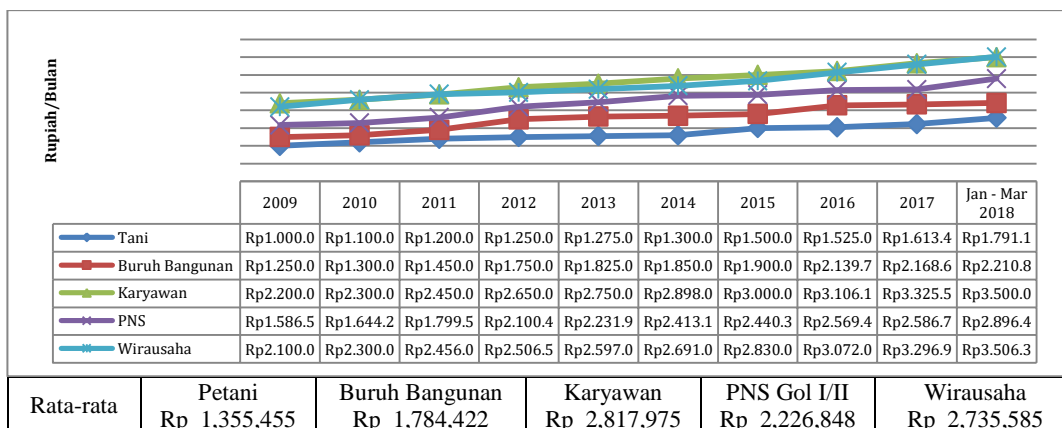
Perkembangan Pendapatan Masyarakat

Tingkat

Untuk kepentingan analisis,
data pendapatan masyarakat di
Kabupaten Halmahera Tengah

diklasifikasikan atas upah tani, upah buruh bangunan, upah karyawan, gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan I/II, dan pendapatan wirausaha yang diperoleh per bulan. Perkembangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. Secara rata-rata sepanjang periode pengamatan 2009 s.d. 2018, besarnya upah tani adalah Rp. 1.355.455.- per bulan dengan pertumbuhan rata-rata 6,79 % per tahun. Upah rata-rata buruh bangunan adalah Rp. 1.784.422.- per

bulan dengan pertumbuhan rata-rata 6,72%. Upah rata-rata dari karyawan adalah sebesar Rp. 2.817.975.- per bulan dengan rata-rata pertumbuhan 5,31 per tahun. Kemudian gaji pokok PNS Gol. I/II secara rata-rata adalah Rp. 2.226.848.- per bulan dengan pertumbuhan 7,03 %. Sedangkan pendapatan dari wirausaha secara rata-rata per bulan selama adalah sebesar Rp. 2.735.585.- dengan pertumbuhan rata-rata 5,89 %.



Sumber : Hasil Analisis, 2018.

Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 s.d. 2018 Bulan Maret

Daya Beli Masyarakat Dengan Indikator Rasio Pendapatan Terhadap Harga Pangan Pokok Di Kabupaten Halmahera Tengah

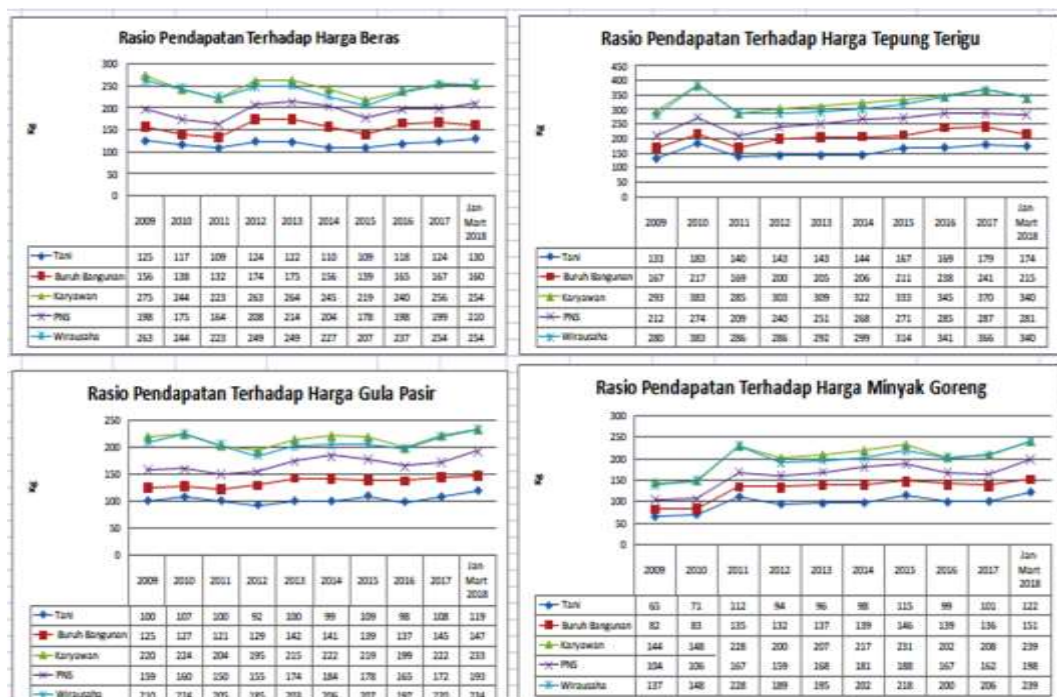
Indeks daya beli berdasarkan rasio pendapatan terhadap harga dari masing-masing bahan pangan pokok mengasumsikan bahwa dimisalkan

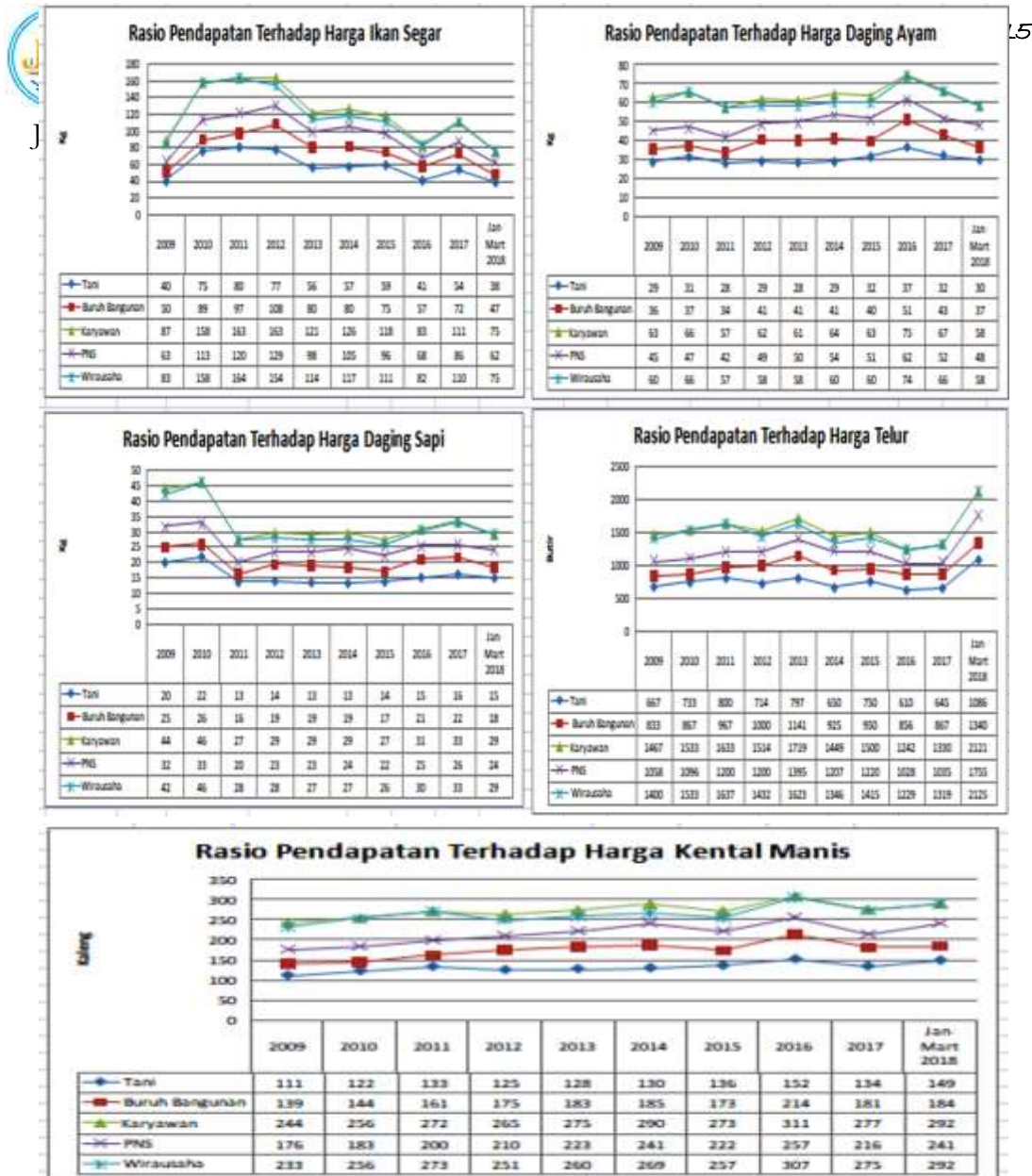
ketika pendapatan rumah tangga tertentu dialokasikan secara keseluruhan terhadap salah satu bahan pangan, maka dapat diketahui jumlah bahan pangan yang dapat dibeli berdasarkan kemampuan pendapatan rumah tangga untuk

mengkompensasi harga dari bahan pangan tertentu, sehingga dapat diketahui indeks daya beli setara konsumsi bahan pangan pokok tersebut.

Diukur dengan setara konsumsi masing-masing bahan pangan pokok, daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung berfluktuatif sepanjang periode analisis tahun 2009 hingga bulan Maret tahun 2018. Secara keseluruhan pada ke-9 bahan pangan pokok yang dikonsumsi, daya beli masyarakat paling besar dinikmati oleh kelompok masyarakat karyawan

dan diikuti oleh kelompok wirausaha, PNS gol I/II, buruh bangunan, dan petani. Perbedaan dan fluktuasi daya beli masyarakat disebabkan oleh perubahan tingkat harga pada setiap bahan pangan pokok yang tidak mampu dikompensasi oleh perubahan pendapatan pada setiap kelompok masyarakat. Hasil analisis terhadap daya beli masyarakat dengan indikator rasio pendapatan terhadap bahan pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah dapat disajikan secara ringkas dalam Gambar 4 berikut.





Sumber : Hasil Analisis, 2018-12-25

Gambar 4. Daya Beli Masyarakat Dengan Indikator Rasio Pendapatan Terhadap Harga Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2009 s.d. 2018

Setara dengan konsumsi beras, daya beli masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2010 hingga 2011 dan pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Rata-rata daya beli petani setara konsumsi beras adalah sebesar 119 kg yang memposisikan petani sebagai kelompok dengan daya beli terendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Untuk buruh bangunan, daya

beli rata-rata setara konsumsi beras adalah 156 kg. Untuk karyawan, daya beli rata-rata adalah 241 kg setara konsumsi beras. Untuk PNS gol I/II, daya beli rata-rata setara konsumsi beras adalah 195 kg. Sedangkan kelompok masyarakat yang memiliki daya beli tertinggi dinikmati oleh karyawan dengan daya beli rata-rata setara konsumsi beras sebesar 248 kg. Kemudian

setara konsumsi gula pasir, peningkatan daya beli masyarakat hanya terjadi pada tahun 2013, tahun 2017 dan tahun 2018 per bulan Januari hingga Maret. Sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2016, seluruh kelompok masyarakat mengalami penurunan daya beli setara konsumsi gula pasir secara serempak. Daya beli rata-rata setara konsumsi gula pasir adalah untuk petani sebesar 103 kg, untuk buruh bangunan sebesar 135 kg, untuk karyawan sebesar 215 kg, untuk PNS gol I/II sebesar 169 kg, dan untuk wirausaha sebesar 209 kg.

Selanjutnya diukur setara konsumsi tepung terigu, daya beli rata-rata setara konsumsi tepung terigu adalah untuk petani sebesar 158 kg, untuk buruh bangunan sebesar 207 kg, untuk karyawan sebesar 328 kg, untuk PNS gol I/II sebesar 258 kg, dan untuk wirausaha sebesar 319 kg. Daya beli petani, buruh bangunan, PNS gol I/II dan wirausaha mengalami penurunan pada tahun 2011 dan tahun 2018 per bulan Januari hingga Maret, sedangkan karyawan hanya mengalami penurunan daya beli pada tahun 2018 per bulan Januari hingga Maret. Kemudian setara konsumsi

minyak goreng, daya beli seluruh kelompok masyarakat yang dianalisis mengalami penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2016, sedangkan pada tahun lainnya terjadi peningkatan daya beli. Daya beli rata-rata setara konsumsi minyak goreng adalah untuk petani sebesar 97 kg, untuk buruh bangunan sebesar 128 kg, untuk karyawan sebesar 202 kg, untuk PNS gol I/II sebesar 160 kg, dan untuk wirausaha sebesar 196 kg.

Daya beli diukur setara konsumsi ikan segar oleh masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung berkejolak dan menurun sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2018 per bulan Januari hingga Maret. Dengan besarnya pendapatan dan perubahan harga yang dihadapi, daya beli rata-rata petani setara konsumsi ikan segar sebesar 58 kg. Kemudian untuk buruh bangunan setara 75 kg, untuk karyawan setara 120 kg, untuk PNS gol I/II setara 94 kg, dan wirausaha dengan daya beli setara 117 kg konsumsi ikan segar. Sama halnya dengan ikan segar, daya beli masyarakat setara konsumsi daging ayam juga cenderung berfluktuasi menurun pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2015, dan 2017 hingga

tahun 2018. Rata-rata daya beli Petani setara konsumsi daging ayam adalah 30 kg, daya beli buruh bangunan setara 40 kg, daya beli karyawan setara 64 kg, daya beli PNS gol I/II setara 50 kg dan daya beli wirausaha setara konsumsi 62 kg daging ayam.

Untuk daya beli setara konsumsi daging sapi, daya beli masyarakat pada umumnya cenderung stabil dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2011 dan tahun 2018. Ketika seluruh pendapatan dikompensasikan untuk konsumsi daging sapi, teridentifikasi bahwa daya beli petani sebesar 16 kg, daya beli buruh bangunan sebesar 20 kg, daya beli karyawan sebesar 33 kg, daya beli PNS gol I/II sebesar 25 kg, dan daya beli wirausaha sebesar 32 kg. Demikian juga jika daya beli yang diukur setara dengan konsumsi susu kental manis maupun telur, bahwa daya beli tertinggi dinikmati oleh karyawan dengan daya beli setara konsumsi susu kental manis adalah sebesar 275 kaleng dan untuk telur setara 1551 butir. Sedangkan daya beli terendah setara konsumsi susu kental manis dan telur, dirasakan oleh petani dengan daya beli setara konsumsi susu kental

manis adalah 132 kaleng dan untuk telur setara 745 butir.

Sesuai dengan hasil analisis tersebut, daya beli masyarakat sangat rendah ketika diukur setara dengan konsumsi daging sapi. Sedangkan daya beli masyarakat sangat tinggi ketika diukur setara dengan konsumsi telur. Tinggi atau rendahnya daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah atas setiap bahan pangan yang dikonsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang berlaku di pasar atas bahan pangan. Disisi lain, pendapatan masyarakat tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan untuk melakukan penyesuaian atas perubahan harga bahan pangan. Dari seluruh bahan pangan yang dianalisis, daya beli masyarakat pada tahun 2018 yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2009, terjadi pada konsumsi bahan pangan daging sapi dengan penurunan daya beli rata-rata pada seluruh kelompok masyarakat yang dianalisis mencapai 22,32 %.

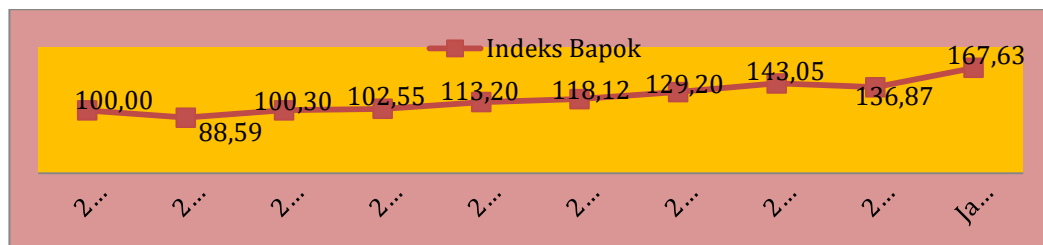
Daya Beli Masyarakat Dengan Indikator Rasio Pendapatan Terhadap Indeks Harga Pangan Pokok Di Kabupaten Halmahera Tengah

Berbeda dengan indikator sebelumnya, daya beli masyarakat

terhadap bahan pangan pokok pada pendekatan ini tidak diukur menurut masing-masing bahan pangan pokok. Daya beli dalam pendekatan ini diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan setiap kelompok masyarakat dengan indeks harga yang berlaku secara keseluruhan pada bahan pangan pokok. Tahapan terpenting dalam analisis daya beli masyarakat dengan pendekatan ini adalah, pertama menghitung indeks bahan pangan pokok dengan mangkalkulasi data pangsa pengeluaran penduduk dan harga dari setiap bahan pangan pada setiap periode. Kedua menghitung rasio pendapatan terhadap indeks bahan pangan pokok yang telah dihitung

sebelumnya. Berikut pada Gambar 5 disajikan indeks harga bahan pangan pokok yang telah dianalisis.

Dengan menjadikan tahun 2009 sebagai tahun dasar analisis, indeks harga bahan pangan pokok mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 11,41 % atau berubah dari 100 menjadi 88,59. Sedangkan pada tahun 2011 hingga bulan Maret tahun 2018, indeks harga bahan pangan pokok terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 per bulan Januari hingga Maret, indeks harga bahan pangan pokok mengalami peningkatan hingga 67,63 % atau berubah dari 100 di tahun 2009 menjadi 167,63 di tahun 2018.



Sumber : Hasil Analisis, 2018.

Gambar 5. Perkembangan Indeks Harga Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009 s.d. 2018

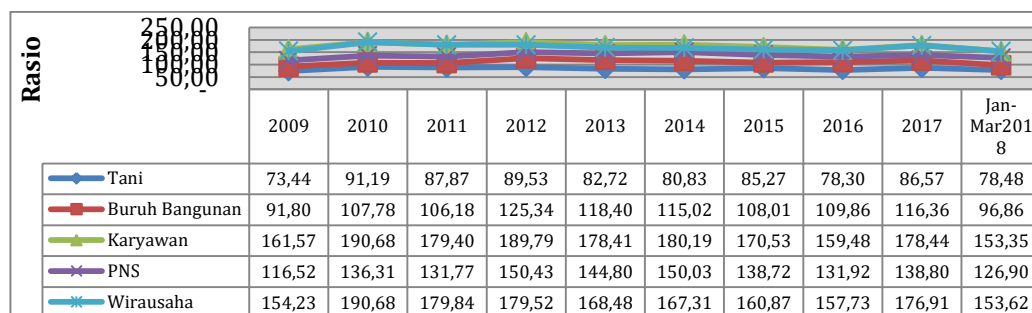
Dengan mendasari pada indeks harga bahan pangan pokok pada Gambar 5 di atas, selanjutnya dapat dianalisis daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah dengan indikator rasio pendapatan terhadap indeks harga bahan pangan

pokok, sebagaimana tersaji pada Gambar 6 berikut. Hasil analisis menjelaskan bahwa daya beli masyarakat terbesar dinikmati oleh karyawan dan wirausaha dan diikuti oleh PNS gol I/II, buruh bangunan dan petani. Disaat indeks harga

bahan pangan pokok pada tahun 2010 mengalami penurunan, daya beli masyarakat pada umumnya mengalami kenaikan di tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011, daya beli masyarakat kembali mengalami penurunan.

Kemudian pada tahun 2012 daya beli masyarakat secara keseluruhan kembali mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2012 terjadi pula kenaikan pada indeks harga bahan pangan pokok. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan

pendapatan masyarakat pada tahun 2012 yang mampu mengkompensasi perubahan indeks harga yang terjadi. Dibandingkan dengan tahun 2009, daya beli yang dirasakan masyarakat pada tahun 2018 jauh lebih besar. Indeks daya beli petani pada tahun 2018 adalah 78,48, kemudian daya beli buruh bangunan sebesar 96,86, daya beli karyawan sebesar 153,35, daya beli PNS gol I/II sebesar 126,90, dan daya beli wirausaha sebesar 153,62.



Sumber : Hasil Analisis, 2018.

Gambar 6. Indeks Daya Beli Masyarakat Dengan Indikator Rasio Pendapatan Terhadap Indeks Harga Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009 s.d. 2018

Pada dasarnya daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami penurunan disaat terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dengan persentase yang lebih besar. Upaya perbaikan daya beli dapat dimulai dari kedua variabel tersebut baik harga pangan maupun pendapatan masyarakat. Menjaga agar tingkat

harga tetap stabil dan mampu dijangkau oleh masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi domestik atau dalam wilayah, perbaikan rantai distribusi, peningkatan persediaan pangan, maupun pengendalian harga di pasar dari tindakan spekulasi. Kemudian dari aspek pendapatan, upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui penyadaran,

pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Petani maupun Buruh Bangunan, perluasan kesempatan kerja terutama pada sektor informal melalui tumbuh kembang kewirausahaan di masyarakat. Lebih penting lagi, dengan karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan maka konektivitas antar pulau dan wilayah perlu menjadi prioritas melalui daya dukung infrastruktur yang optimal.

PENUTUP

Setelah melalui proses analisis dan pembahasan terkait daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah menurut kelompok barang, secara umum lebih besar teralokasi pada pengeluaran untuk bahan makanan, pendidikan, listrik dan sandang. Lebih spesifik,

pengeluaran untuk bahan makanan khususnya bahan pangan pokok lebih besar dialokasikan untuk pemenuhan konsumsi beras dan ikan segar, diikuti oleh konsumsi tepung terigu, gula dan minyak goreng. Sedangkan alokasi pengeluaran untuk konsumsi pangan pokok yang bersumber dari hewani antara lain daging ayam, susu, telur dan daging sapi masih sangat rendah. Harga bahan pangan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah selama periode pengamatan tahun 2009 hingga tahun 2018 bulan Januari – Maret, cenderung mengalami kenaikan pada kisaran 2 % - 12 % dan itu terjadi pada seluruh bahan pangan pokok kecuali minyak goreng. Sedangkan disisi lain, tingkat pendapatan masyarakat hanya mengalami perubahan pada kisaran 5 % - 7 %, dengan pendapatan tertinggi dinikmati oleh karyawan dan wirausaha dan sebaliknya pendapatan terendah dirasakan oleh petani. Hasil indept

interview dan analisis menunjukkan bahwa keseluruhan kelompok masyarakat terutama petani dan buruh bangunan masih mengeluhkan nilai pendapatan yang masih kecil dibandingkan nilai pengeluaran yang sangat besar karena tingginya harga dan tingkat kebutuhan yang terus meningkat.

2. Daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah dengan indikator rasio pendapatan terhadap masing-masing harga bahan pangan pokok cenderung berfluktuasi namun mengalami perbaikan yang signifikan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2009, kecuali daya beli yang diukur setara konsumsi daging sapi. Daya beli setara konsumsi daging sapi mengalami penurunan hingga 22,32 % dikarenakan persentase kenaikan pendapatan kurang mampu mengkompensasi kenaikan harga daging sapi.
3. Diukur dengan indikator rasio pendapatan terhadap indeks harga bahan pangan pokok, daya beli

masyarakat juga menunjukkan terjadi perbaikan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2009, tetapi itu hanya terjadi pada petani, buruh bangunan, dan PNS gol I/II. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, daya beli masyarakat pada tahun 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan 12,38 %. Tingkat daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah dari ranking terendah secara berurutan adalah dirasakan oleh kelompok masyarakat petani, diikuti oleh buruh bangunan, PNS gol I/II, wirausaha dan karyawan.

Sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan, maka terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan melalui penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan fluktuasi harga yang banyak berkontribusi terhadap inflasi daerah, khususnya harga komoditas pangan. Pengendalian harga tersebut dilakukan dengan memantau harga secara rutin dan

- melakukan operasi pasar sehingga apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar dapat segera menstabilkan harga tersebut.
2. Pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap harga pangan di pasar melalui penetapan batasan harga terendah (floor price) maupun batasan harga tertinggi (*ceiling price*).
 3. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan produksi pangan dalam wilayah agar mampu memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan wilayah terhadap komoditas pangan impor dengan harapan tingkat harga pangan yang berlaku dipasar lebih dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada petani maupun peternak agar tetap memproduksi bahan pangan.
 4. Penambahan pemain baru (produsen) di pasar agar dapat membuat pasar lebih kompetitif dan pada akhirnya menurunkan harga.
 5. Meningkatkan efisiensi distribusi bahan-bahan pangan pokok. Hal tersebut dapat dicapai dengan memperbaiki infrastruktur logistik, memangkas rantai distribusi dan mencegah terjadinya penimbunan stok.
 6. Selain hal-hal tersebut di atas, pemerintah hendaknya dapat mengurangi dampak negatif kenaikan harga bahan-bahan pangan pokok melalui kebijakan subsidi (harga dan volume) untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninymous. (2015). *Kamus Besar*. Diunduh tanggal 1 November 2015 dari <http://www.kamusbesar.com/49814/daya-beli>
- Ariani, M. (2010). *Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan*. Gizi Indonesia 2010, 33(1):20-28.
- BPS Halmahera Tengah. 2009-2018. *Halmahera Tengah Dalam Angka*. BPS Kabupaten Halmahera Tengah. Weda.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). (1998). *Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan*

- Perindustrian* No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat. Diunduh tanggal 6 Agustus 2015 dari <http://www.kemenperin.go.id/>
- FAO. (2010). *Agriculture and Consumer Protection. "Dimensions of Need – Staple Foods: What Do People Eat?."* Diunduh tanggal 20 Agustus 2015 dari <http://www.fao.org/>
- Firdaus, M. 2017. *Menyikapi Gejolak Harga Pangan.* Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diunduh tanggal 1 Maret 2018 dari <http://www.fem.ipb.ac.id/>
- Frankenberg, E., D. Thomas, and K. Beegle. (1999). *The Real Cost of Indonesia's Economic Crisis : Preliminary Findings from the Indonesia Family Life Surveys.* Labor and Population Program, RAND Working Paper Series 99-04.
- Galtier, F. (2009). *How to Manage Food Price Instability in Developing Countries.* Working Paper Moisa N 5. Seminar "How to Manage Agricultural Price Volatility", Agence Francaise Pour Le Developpement Paris (FRA).
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian.* ANDI Offset. Yogyakarta.
- Hidayah, N. (2011). *Kesiapan Psikologis Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Menghadapi Diversifikasi Pangan Pokok.* Jurnal Humanitas Vol. Viii No.1 Januari 2011.
- Ivanic, M. and W. Martin. (2008). *Implications of Higher Global Food Price for Poverty in Low-Income Countries.* World Bank Development Research Group.
- Jum'at, F. (2008). *Penggunaan Metode Pohon Regresi Untuk Mengkaji Nilai Indeks Daya Beli di Jawa Barat.* Skripsi Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Perdagangan (2010). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010- 2014.* Diunduh tanggal 10 September 2015 dari <http://www.kemendag.go.id/id/news/2010/04/12/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-03m-dagper12010-tentang-reencanastrategis-kem.>
- Kementerian Pertanian. (2010). *Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014.* Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kementerian Pertanian.
- Nurkhayani, E. (2009). *Analisis Permintaan Pangan dan Gizi di Indonesia.* Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta

- Rachman, H. P.S.(2005). *Metode Analisis Harga Pangan*. Disampaikan pada Apresiasi Sistem Distribusi dan Harga Pangan oleh Badan Ketahanan Pangan di Pusat Manajemen Pengembangan SDM Pertanian, Ciawi-Bogor 3 – 5 Juli 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Resnia, R. (2012). *Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Daya Beli Kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol 6 No 2, Desember 2012. Jakarta
- Saliem, H.P., M. Ariani, Y. Marisa dan T.B. Purwantini. (2002). *Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Setneg Republik Indonesia. (1996). *Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan*. Diunduh tanggal 10 September 2015 dari <http://www.setneg.go.id/>
- Setneg Republik Indonesia. (1996). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan*. Diunduh tanggal 10 September 2015 dari <http://www.setneg.go.id/>
- Setneg Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Diunduh tanggal 10 September 2015 dari <http://www.setneg.go.id/>
- Sobri. (1999). *Ekonomi Makro*. BPFE-UGM. Yogyakarta
- Sukardi. (2009). *Konsep Daya Beli Masyarakat*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Diunduh tanggal 1 November 2015 dari <http://dokumen.tips/document/s/beberapa-factor-yang-mempengaruhi-aya-beli-masyarakat-yaitu.html>
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.